

ANALISIS POTENSI DAN KESENJANGAN WILAYAH KABUPATEN SUKABUMI, PROPINSI JAWA BARAT

Analysis of Potensial and Gap Region of Sukabumi District, West
Java Province

Izzan Faruqi¹, Setia Hadi², Sahara²

Diterima: 27 Agustus 2015

Disetujui: 21 Oktober 2015

Abstrak: Pembangunan wilayah identik dengan adanya pertumbuhan. Pertumbuhan pun dapat bernilai positif namun jika tidak dibangun secara komprehensif akan menimbulkan dampak negatif di sisi lain. Kabupaten Sukabumi kaya akan berbagai potensi diantaranya potensi bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, energi panas bumi dan tambang. Namun demikian Kabupaten Sukabumi adalah salah satu Kabupaten yang masih digolongkan daerah tertinggal di Propinsi Jawa Barat. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis perkembangan wilayah di Kabupaten Sukabumi dan menganalisis potensi daerah serta kesenjangan pembangunan antar wilayah di Kabupaten Sukabumi. Hasil penelitian ini menunjukkan Perkembangan wilayah Kabupaten berdasarkan beberapa kriteria dari Kementerian Desa, Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi menunjukkan bahwa dapat dikatakan sebagai daerah yang relatif tertinggal. Terdapat kesenjangan pembangunan daerah di Kabupaten Sukabumi. Hal ini terlihat dari tingkat perkembangan daerah pada tiap kecamatan yang tidak seragam dan perkembangan industri di tiap kecamatan tidak tumbuh dengan seragam. Kabupaten Sukabumi mempunyai beberapa potensi sektor diantaranya sektor industri. Pada sektor industri khususnya, industri pengolahan non migas dapat menjadi sektor unggulan karena dapat berkontribusi dan memiliki keterkaitan yang kuat dengan sektor lainya sehingga dapat mempengaruhi sektor lainya.

Kata kunci : *potensi wilayah, kesenjangan, perkembangan wilayah*

Abstract: Regional development is synonymous with growth. Growth can also be positive, but if it is not built in a comprehensive manner would cause a negative impact on the other side. Sukabumi district is rich in various potential including the potential for agriculture, plantation, forestry, marine, geothermal energy and mines. However, Sukabumi District is one district that is still classified as disadvantaged areas in West Java. The purpose of this study was to analyze the development of the area in Sukabumi and analyzing the potential of the region as well as the development gap between regions in Sukabumi. The results showed the development of the district is based can be regarded as a relatively underdeveloped area. There is a gap of regional development in Sukabumi. Sukabumi district has several potential sectors including the industrial sector in particular, non-oil processing industry. In the industrial sector in particular, non-oil processing industry can be a dominant sector as it can contribute to and have strong linkages with other sectors that can influence other sectors.

Keywords : potential of the region, gap, development of the region

¹ Program Studi Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan, IPB

² Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Pascasarjana IPB

PENDAHULUAN

Pembangunan wilayah secara umum mempunyai tujuan untuk mengembangkan wilayah ke arah yang lebih baik dengan memanfaatkan potensi wilayah untuk mensejahterahkan masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Pengembangan suatu wilayah memerlukan kebijakan dan strategi serta program yang tepat. Keberhasilan pengembangan wilayah juga ditentukan oleh peran serta aktif masyarakat dalam mendukung program-program yang digulirkan oleh pemerintah. Menurut Masykur (2000) ada tiga indikator keberhasilan pengembangan wilayah yang dapat dilihat sebagai kesuksesan pembangunan daerah. Indikator pertama adalah produktivitas, yang dapat diukur dari perkembangan kinerja suatu institusi beserta aparatnya. Indikator kedua adalah efisiensi, yang terkait dengan meningkatnya kemampuan teknologi/sistem dan kualitas sumber daya manusia dalam pelaksanaan pembangunan. Terakhir adalah partisipasi masyarakat, yang dapat menjamin kesinambungan pelaksanaan suatu program di suatu wilayah.

Menurut Rustiadi *et al* (2009) pendekatan pembangunan yang sangat menekankan pada pertumbuhan ekonomi makro cenderung mengabaikan terjadinya ketimpangan atau kesenjangan pembangunan antar wilayah dimana investasi dan sumberdaya terserap dan terkonsentrasi di perkotaan dan pusat pertumbuhan. Ketimpangan wilayah pada akhirnya menimbulkan permasalahan dalam konteks makro yang sangat merugikan proses pembangunan yang ingin dicapai dalam suatu negara. Ketidakseimbangan pembangunan antar wilayah di satu sisi terjadi dalam bentuk buruknya distribusi dan alokasi pemanfaatan sumberdaya yang menciptakan inefisiensi dan tidak optimalnya sistem ekonomi. Ketidakseimbangan pembangunan menghasilkan struktur hubungan antarwilayah yang membentuk suatu interaksi yang saling memperlemah. Kesenjangan antar wilayah di Indonesia, terjadi karena adanya keragaman potensi sumber daya alam, letak geografis, kualitas sumber daya manusia, ikatan etnis atau politik. Keberagaman ini dapat menjadi sebuah keunggulan dalam satu sisi, namun disisi lain dapat berpotensi menjadi sumber instabilitas sosial dan politik nasional.

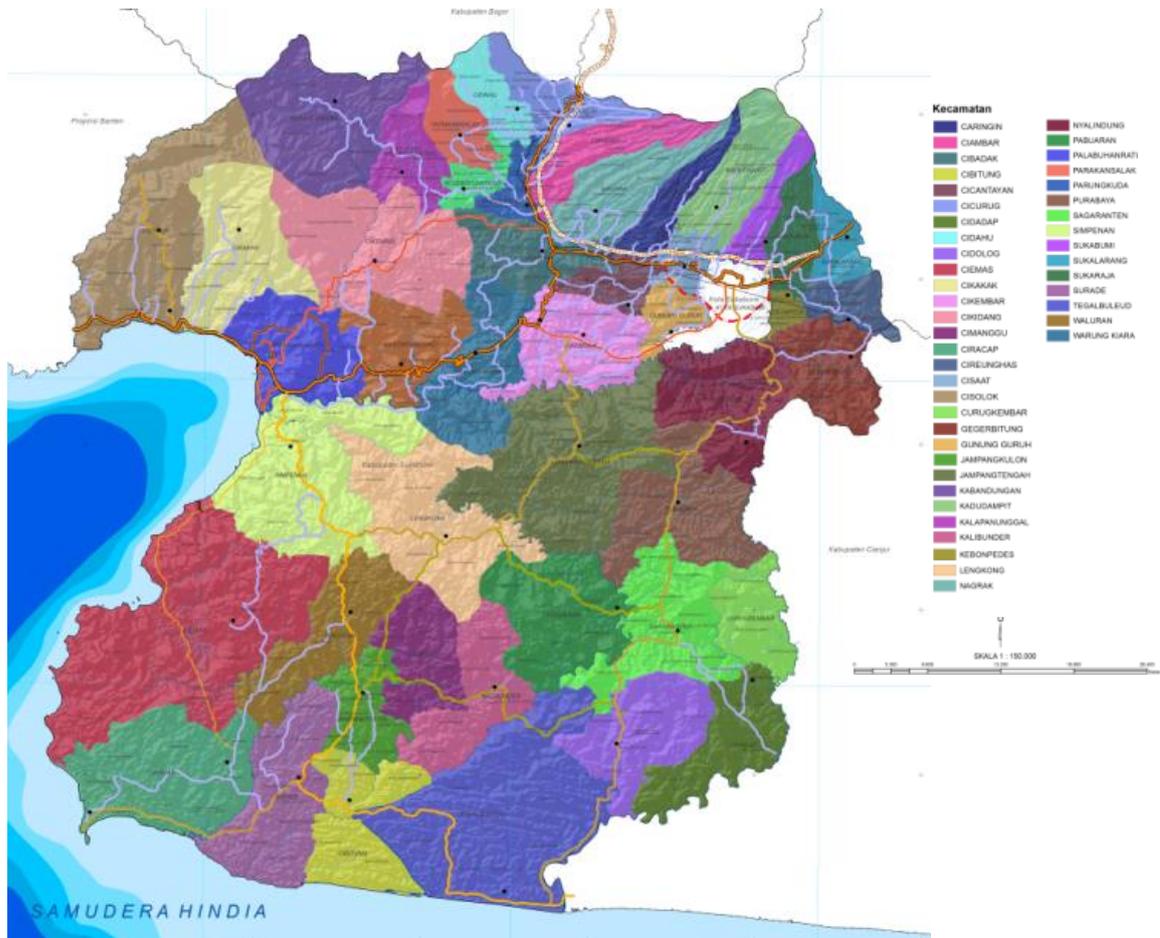
Permasalahan kesenjangan dalam pembangunan masih didominasi oleh permasalahan kemiskinan, pendidikan dan kesehatan, serta rendahnya akses masyarakat pedesaan, wilayah terpencil, perbatasan dan wilayah tertinggal terhadap sarana dan prasarana sosial ekonomi (Harafera,2011). Secara potensi sumber daya alam, Kabupaten Sukabumi kaya akan berbagai potensi diantaranya potensi bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, energi panas bumi dan tambang. Potensi sumberdaya alam lainnya yang ada di Kabupaten Sukabumi adalah Potensi geologi pertambangan. Namun demikian Kabupaten Sukabumi adalah salah satu Kabupaten yang masih digolongkan daerah tertinggal di Propinsi Jawa Barat. Hal ini dapat di indikasikan dengan masih tingginya presentase penduduk miskin pada tahun 2012 yaitu 9.72 % dan presentase penduduk menganggur pada tahun 2011 yaitu 10.10 % (BPS,2012). Perlu adanya penyelenggaraan pembangunan secara terencana dan berorientasi terhadap pengurangan kesenjangan antarwilayah menjadi sangat penting untuk dilakukan. Pemahaman secara komprehensif terhadap persoalan kesenjangan tersebut perlu menjadi acuan dalam perumusan perencanaan pembangunan, sehingga dapat mendukung upaya pemerataan pembangunan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan wilayah di Kabupaten Sukabumi dan menganalisis potensi daerah serta kesenjangan pembangunan antar wilayah di Kabupaten Sukabumi.

METODE

Lokasi waktu penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Kabupaten Sukabumi terdiri dari 47 kecamatan, 5 kelurahan dan 381 desa. Penelitian ini dilakukan dari bulan Maret 2015 – Juni 2015.



Sumber : Bappeda, 2013

Gambar 1 Peta Administrasi Kabupaten Sukabumi

Jenis dan Sumber Data

Data yang diambil adalah data primer dan sekunder. Data primer yang diperoleh dikaitkan dengan relevansi tujuan penelitian. Data primer diambil dari stakeholder seperti Instansi Pemerintah Daerah dan Masyarakat melalui wawancara menggunakan kuesioner yang dibuat sesuai dengan tujuan penelitian. Data sekunder di ambil dari berbagai sumber seperti metode studi pustaka, BPS, BAPPEDA, instansi terkait lainnya. Data sekunder meliputi data capaian sasaran strategis dari Kementerian Desa, Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan menggunakan 5 indikator bidang diantaranya

ekonomi, sumberdaya manusia, sumberdaya buatan, aksesibilitas dan karakteristik daerah, data PDRB Kabupaten Sukabumi atas dasar harga konstan tahun 2000, data realisasi APBD Kabupaten Sukabumi, data jenis kegiatan usaha masyarakat Kabupaten Sukabumi.

Analisis Data

Evaluasi perkembangan wilayah dilakukan dengan cara menganalisis capaian sasaran strategis (stranas) dari Kementerian Desa, Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan menggunakan 5 indikator bidang diantaranya ekonomi, sumberdaya manusia, sumberdaya buatan, aksesibilitas dan karakteristik daerah. Kemudian analisis alokasi APBD dengan melihat proporsi perbandingan pendapatan dan pengeluaran daerah, proporsi pengeluaran belanja untuk pembangunan dan belanja rutin. Data yang digunakan adalah data sekunder seperti data PDRB Kabupaten Sukabumi atas dasar harga konstan tahun 2000, data realisasi APBD Kabupaten Sukabumi, data sarana dan prasarana, data aksesibilitas, data karakteristik daerah. Dari hasil olahan analisis capaian stranas Kementerian Desa, Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi akan dilakukan analisis deskriptif untuk mengevaluasi perkembangan status daerah tertinggal.

Analisis potensi daerah dilakukan dengan analisis Tabel I-O. Model Tabel Input Output (I-O) merupakan suatu pendekatan yang mampu menunjukkan performa pembangunan perekonomian wilayah khususnya menyangku keterkaitan antar sektor. Bentuk Tabel I-O yang mendasari tabel I-O modern adalah Tabel I-O yang dikembangkan oleh Leontief pada tahun 1947. Saat ini Analisis I-O telah berkembang luas menjadi model analisis standard untuk melihat struktur keterkaitan perekonomian nasional, wilayah dan antar wilayah, serta dimanfaatkan untuk berbagai peramalan perkembangan struktur perekonomian. Penelitian Juanti, *et al.* (2014) menggunakan model Input Output dan *Analytical Hierarchy Process* (AHP) dalam menganalisis peranan sub sektor perikanan terhadap keterkaitan sektor lainnya di Kabupaten Sidoarjo. Pada penelitian ini tabel input output yang digunakan adalah Tabel Input Output Kabupaten Sukabumi (27x27) yang diturunkan berdasarkan dari Tabel Input Output Propinsi Jawa Barat (38x38) tahun 2003. Sektor-sektor yang ada dalam Tabel I-O Kabupaten Sukabumi merupakan agregasi dari sektor yang ada pada Tabel-O Provinsi Jawa Barat dengan disesuaikan dengan sektor usaha yang ada pada PDRB. Asumsi yang digunakan adalah adanya keserupaan struktur ekonomi antara Kabupaten Sukabumi dengan Propinsi Jawa Barat dengan metode RAS. Beberapa parameter teknis yang dapat diperoleh melalui analisis I-O adalah:

1. Keterkaitan langsung ke belakang (*direct backward linkage*) yang menunjukkan efek permintaan suatu sektor terhadap perubahan tingkat produksi sektor-sektor yang menyediakan input antara bagi sektor tersebut secara langsung.
2. Keterkaitan langsung ke depan (*direct forward linkage*) yang menunjukkan banyaknya output suatu sektor yang dipakai oleh sektor-sektor lain.
3. Keterkaitan ke belakang langsung dan tidak langsung (*indirect backward linkage*) yang menunjukkan pengaruh tidak langsung dari kenaikan permintaan akhir satu unit sektor tertentu yang dapat meningkatkan total output seluruh sektor perekonomian.
4. Keterkaitan ke depan langsung dan tidak langsung (*indirect forward linkage*), yaitu peranan suatu sektor dalam memenuhi permintaan akhir dari seluruh sektor perekonomian.
5. Daya sebar ke belakang atau indeks daya penyebaran (*backward linkages effect ratio*) yang menunjukkan kekuatan relatif permintaan akhir suatu sektor dalam mendorong pertumbuhan produksi total seluruh sektor perekonomian.
6. *Multiplier* adalah koefisien yang menyatakan kelipatan dampak langsung dan tidak langsung dari meningkatnya permintaan akhir suatu sektor sebesar satu unit terhadap produksi total semua sektor ekonomi suatu wilayah.

Analisis kesenjangan pembangunan dilakukan dengan analisis Skalogram. Indeks Skalogram merupakan alat analisis untuk mengukur tingkat kesenjangan pembangunan dalam suatu wilayah pengembangan dengan hirarki pusat-pusat aktivitas sosial ekonomi. Hirarki pusat aktivitas diambil dari konsep wilayah fungsional dan wilayah nodal dimana terdapat pusat aktivitas dan hinterland. Data yang digunakan dalam analisis ini adalah data sarana dan prasarana Kabupaten Sukabumi diantaranya fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas perhubungan, fasilitas keagamaan, fasilitas informasi pada 47 Kecamatan di Kabupaten Sukabumi. Pendekatan dengan metode analisis skalogram didasarkan pada suatu asumsi bahwa semakin banyak/tinggi tingkat penyediaan fasilitas pada suatu lokasi, maka wilayah itu semakin berkembang sebaliknya semakin sedikit jumlah sarana dan jenis sarana prasarana pelayanan maka wilayah tersebut dikategori terbelakang. Secara statistik metoda analisis skalogram dapat diformulasikan berdasarkan formula yang dibangun sebagai berikut (Rustiadi *et al.*2009) :

$$K_{ij} = \frac{I_{ij} - \min(I)j}{S_j}$$

Dimana :

- K_{ij} = nilai baku untuk desa ke-i dan jenis sarana ke-j di Kabupaten Sukabumi
 I_{ij} = nilai bobot untuk desa ke-i dan jenis sarana ke-j di Kabupaten Sukabumi
 $\min(I)j$ = nilai minimum untuk jenis sarana ke-j
 S_j = nilai standar deviasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

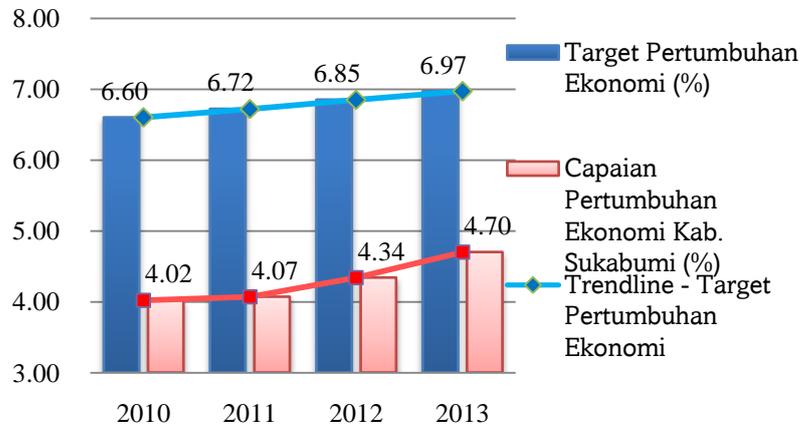
Ada beberapa yang ditetapkan pemerintah dalam pendekatan penetapan daerah tertinggal diantaranya perekonomian masyarakat, sumberdaya manusia, infrastruktur, aksesibilitas, karakteristik daerah, kemampuan keuangan lokal. Pada tahun 2009, Kabupaten Sukabumi merupakan yang termasuk daerah tertinggal. Pada penelitian ini, pada tujuan pertama akan menganalisis perkembangan Kabupaten Sukabumi berdasarkan kriteria dari Kementerian Desa, Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Ekonomi

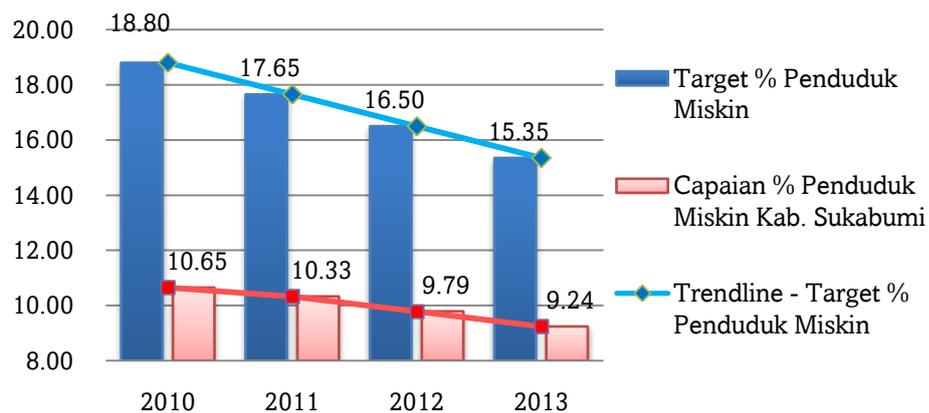
Kriteria kondisi perekonomian masyarakat dapat dilihat dari beberapa sub kriteria diantaranya laju pertumbuhan ekonomi, presentase penduduk miskin dan indeks kedalaman kemiskinan. Pada Grafik 1 terlihat laju pertumbuhan ekonomi dari Kabupaten Sukabumi dan target pertumbuhan ekonomi dari Kementerian Desa, Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi dari tahun 2010 – 2013. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukabumi terlihat masih di bawah target pertumbuhan ekonomi dari pemerintah. Target pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dari pemerintah dapat tumbuh di atas 6 % tiap tahunnya, namun Kabupaten Sukabumi baru mencapai sekitar 4 % tiap tahunnya. Hal ini menandakan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukabumi belum mencapai target yang telah ditetapkan dari pemerintah.

Sub kriteria lainnya dapat dilihat dari presentase penduduk miskin dimana melihat bagaimana rasio penduduk miskin dalam suatu kabupaten terhadap jumlah total penduduk yang ada. Pada Grafik 2 merupakan presentase penduduk miskin di Kabupaten Sukabumi dan target maksimum presentase penduduk miskin dari Kementerian Desa, Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi dari tahun 2010 – 2013. Terlihat pada Grafik 3 bahwa presentase penduduk miskin Kabupaten Sukabumi berada di bawah target maksimum yang telah ditetapkan. Hal ini menandakan dilihat dari presentase penduduk miskin, Kabupaten

Sukabumi dapat mencapai target yang telah ditetapkan selama kurun waktu dari tahun 2010 – 2013.



Gambar 2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Pada Tahun 2010-2013 Kabupaten Sukabumi

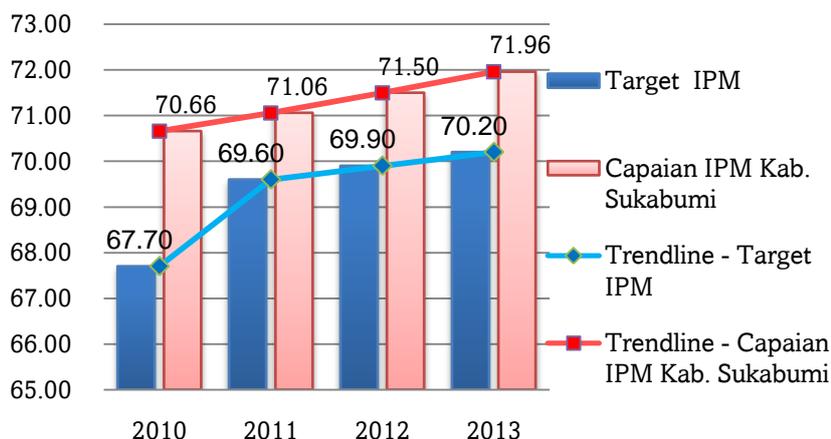


Sumber : BPS Kabupaten Sukabumi, 2014 dan Stranas, 2013

Grafik 2 Presentase Penduduk Miskin Pada Tahun 2010-2013 Kabupaten Sukabumi

Sumberdaya Manusia

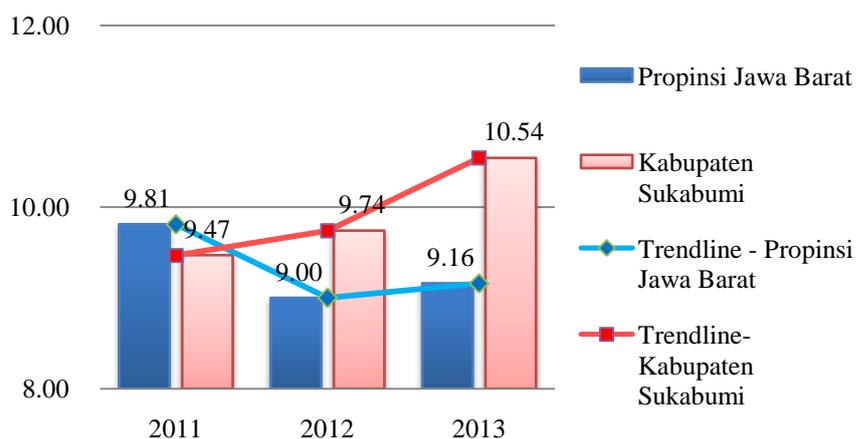
Kriteria SDM (sumberdaya manusia) diukur berdasarkan beberapa sub kriteria diantaranya tenaga kerja, kesehatan dan pendidikan. Kriteria secara umum dari bidang SDM ini adalah indeks pembangunan manusia (IPM) dari suatu daerah, dengan indeks ini dapat melihat sejauh mana pembangunan daerah dari segi sumberdaya manusia di daerah tersebut. Pada Grafik 3 di bawah ini terlihat capaian indeks pembangunan manusia Kabupaten Sukabumi berada di atas target yang ditetapkan pemerintah. Target IPM yang ditetapkan berkisar antara 67 – 70 selama tahun 2010-2013 sedangkan IPM Kabupaten Sukabumi berada pada kisaran 70-71 selama tahun 2010-2013. Dengan demikian secara umum kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Sukabumi sudah mencapai target yang ditetapkan Kementerian Desa, Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi.



Sumber : BPS Kabupaten Sukabumi, 2014 dan Stranas, 2013

Grafik 3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2010-2013 Kabupaten Sukabumi

Ada beberapa sub kriteria pendukung lainnya dalam kriteria bidang sumberdaya manusia diantaranya presentase pengangguran terbuka. Pada Grafik 4 di bawah ini adalah presentase pengangguran terbuka di Kabupaten Sukabumi dan Propinsi Jawa Barat pada kurun waktu 2011-2013. Pada 2011 presentase pengangguran terbuka Kabupaten Sukabumi lebih rendah dibandingkan Propinsi Jawa Barat. Kemudian selama 2012-2013 terjadi peningkatan presentase pengangguran terbuka di Kabupaten Sukabumi sedangkan di Propinsi Jawa Barat mengalami penurunan selama dua tahun tersebut.

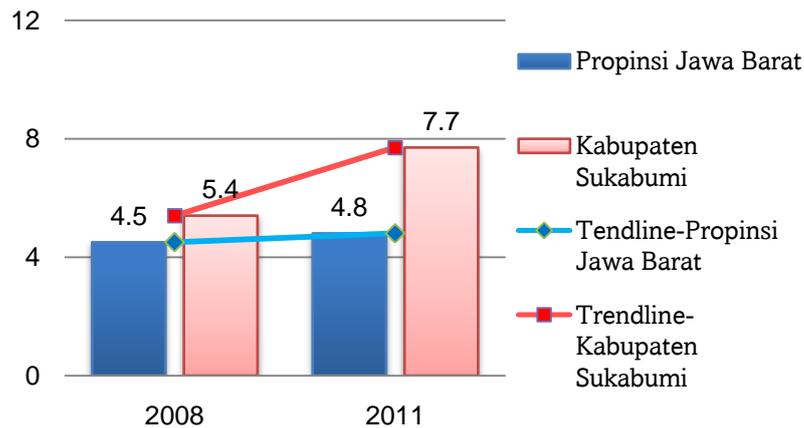


Sumber : BPS Kabupaten Sukabumi dan Propinsi Jawa Barat, 2014

Grafik 4 Presentase Pengangguran Terbuka Tahun 2011-2013 Kabupaten Sukabumi dan Propinsi Jawa Barat

Aksesibilitas dan Infrastruktur

Kriteria aksesibilitas dapat dilihat dari indikator rata-rata jarak dari kantor desa ke Kabupaten yang membawahinya. Sedangkan kriteria infrastruktur yang digunakan adalah beberapa indikator diantaranya infrastruktur transportasi dimana jumlah desa di suatu daerah dengan berbagai jenis permukaan jalan, presentase rumah tangga pengguna telepon dan listrik, jumlah bank umum dan bank perkreditan rakyat dan jumlah desa yang mempunyai pasar tanpa bangunan permanen.



Sumber : Podes, 2008 dan 2011

Gambar 5 Rata-rata Jarak dari Kantor Desa ke Kabupaten yang Membawahinya di Kabupaten Sukabumi

Pada Tabel 1 dibawah ini merupakan beberapa sub kriteria dari kriteria infrastruktur. Berdasarkan jumlah desa dengan jenis permukaan jalan yang berbeda selama kurun waktu 2008 dan 2011, adanya peningkatan jumlah desa dengan jenis permukaan jalan aspal yaitu dari 270 desa menjadi 278 desa dan adanya penurunan jumlah desa dengan jenis permukaan tanah dari 22 desa menjadi 14 desa. Kemudian adanya penurunan pula pada jumlah desa dengan pasar tanpa bangunan permanen dari 57 desa menjadi 42 desa. Pada presentase keluarga pengguna listrik terjadi peningkatan dari 89,21% menjadi 94,11%. Hal ini menandakan adanya peningkatan infrastruktur berupa akses ke pedesaan dan akses penggunaan listrik di Kabupaten Sukabumi.

Tabel 1 Sub Kriteria Infrastruktur

Kriteria	2008	2011
Jumlah Desa dengan Jenis Permukaan Jalan Aspal/Beton	70	278
Jumlah Desa dengan Jenis Permukaan Jalan diperkeras	108	107
Jumlah Desa dengan Jenis Permukaan Jalan Tanah	22	14
Jumlah Desa dengan Jenis Permukaan Jalan Lainnya	0	0
Persentase Keluarga Pengguna Listrik	89,21	94,11
Persentase Keluarga Pengguna Telepon	8,44	6,16
Jumlah Bank Umum	-	87
Jumlah Bank Perkreditan Rakyat	-	48
Jumlah Desa yang Mempunyai Pasar Tanpa Bangunan Permanen	57	42

Sumber : Podes, 2008 dan 2011

Karakteristik Daerah

Beberapa indikator yang dipakai dalam melihat karakteristik daerah adalah presentase desa yang rawan terhadap bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir dan konflik daerah. Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat adanya peningkatan presentase desa yang rawan terhadap bencana alam pada kurun waktu tahun 2008 dan 2011. Peningkatan terjadi pada desa yang rawan terhadap gempa bumi, tanah longsor dan banjir di Kabupaten Sukabumi.

Tabel 2 Sub Kriteria Karakteristik Daerah

Kriteria	2008	2011
Persentase Desa Gempa Bumi	6	83.5
Persentase Desa Tanah Longsor	45.25	36.5
Persentase Desa Banjir	14.5	16.75
Persentase Desa Konflik dalam Satu Tahun Terakhir	-	3.27

Sumber : Podes, 2008 dan 2011

Kemampuan Keuangan Lokal

Kriteria kemampuan keuangan lokal digunakan untuk melihat kinerja pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintah daerah diantaranya selisih penerimaan keuangan daerah dengan belanja pegawai, dana yang tersisa bagi pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan setelah dikurangi biaya tetap, rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah dan belanja, rasio aktifitas dan pengeluaran belanja. Pada Tabel 3 di bawah adalah rasio kemandirian yang menggambarkan ketergantungan keuangan terhadap berbagai sumber dana luar. Semakin tinggi rasio kemandirian maka semakin rendah tingkat ketergantungan terhadap sumber dana dari luar. Dalam kurun waktu tahun 2009-2013, rasio kemandirian pendapatan asli daerah mengalami pertumbuhan, secara rata-rata pertumbuhannya masih sekitar 8%. Hal ini menandakan tingkat ketergantungan keuangan daerah masih tinggi terhadap sumber dana dari luar baik itu dari pemerintah pusat maupun bantuan dari daerah lainnya. Sebagian besar pendapatan daerah Kabupaten Sukabumi berasal dari dana alokasi umum dari pemerintah pusat.

Pertumbuhan pendapatan asli daerah dari realisasinya terus mengalami pertumbuhan secara bertahap namun ada kecenderungan naik turun dalam pertumbuhannya. Pada tahun 2010 dan 2011, PAD Kabupaten Sukabumi naik 22% dan 54%. Kemudian pada tahun 2012 dan 2013 mengalami kenaikan yang menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya yaitu sekitar 22% dan 18%. Pendapatan asli daerah Kabupaten Sukabumi sebagian besar berasal dari retribusi daerah, belum adanya sumber dana yang signifikan berasal dari potensi lokal daerah. Hal ini perlu menjadi perhatian penting agar pengelolaan potensi daerah dapat menjadi tumpuan sumber pendapatan bagi daerah itu sendiri.

Tabel 3 Rasio Kemandirian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2009-2013

Tahun	Realisasi PAD	Total Pendapatan	Kontribusi PAD	Pertumbuhan PAD
2009	80 616 078 322	1 432 336 419 645	6%	-
2010	98 439 617 628	1 519 732 035 963	6%	22%
2011	151 825 718 336	1 856 087 255 070	8%	54%
2012	185 190 545 988	2 033 421 618 055	9%	22%
2013	218 478 439 414	1 878 715 509 000	12%	18%

Sumber : Diolah, 2015

Pengelolaan keuangan daerah juga perlu memprioritaskan alokasi dana pada belanja rutin dan pembangunan secara optimal. Rasio aktifitas menggambarkan presentase alokasi dana yang dialokasikan untuk belanja rutin dan belanja pembangunan. Berdasarkan Tabel 4 mengenai rasio aktifitas belanja Kabupaten Sukabumi menggambarkan lebih dari 50% alokasi belanja masih didominasi belanja rutin yang berupa belanja pegawai baik langsung maupun tidak langsung. Sedangkan alokasi untuk belanja pembangunan yang terdiri dari belanja modal dan belanja barang dan jasa masih diantara 29%-36%. Hal ini menandakan pengeluaran belanja daerah Kabupaten Sukabumi sebagian besar masih diprioritaskan untuk belanja rutin..

Tabel 4 Rasio Aktifitas Belanja Kabupaten Sukabumi Tahun 2009-2013

Tahun	Total Belanja	Belanja Rutin	Rasio	Belanja Pembangunan	Rasio
2009	1 274 679 473 955	743 589 755 794	58%	373 245 549 249	29%
2010	1 621 193 458 295	933 091 081 986	58%	447 919 375 938	28%
2011	1 849 556 484 316	1 046 613 371 054	57%	599 406 924 110	32%
2012	1 999 104 665 251	1 133 486 228 190	57%	701 027 557 161	35%
2013	1 983 747 611 000	1 110 670 393 177	56%	716 486 824 823	36%

Sumber : Diolah, 2015

Berdasarkan beberapa kriteria dalam pendekatan penetapan daerah tertinggal, Kabupaten Sukabumi masih dapat dikatakan sebagai daerah yang relatif belum berkembang. Hal ini dikarenakan pada kriteria bidang ekonomi, sumberdaya manusia dan aksesibilitas masih berada di bawah target yang ditetapkan pemerintah dan belum mencapai capaian Propinsi Jawa Barat. Pada kriteria kemampuan keuangan lokal juga terlihat masih tingginya ketergantungan sumber pendapatan dari luar dimana kontribusi pendapatan asli daerah masih minim. Pengeluaran belanja daerahnya pun masih belum efisien. Salah satu yang menjadi alasan utama adalah laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukabumi masih berada di bawah target yang telah ditetapkan pemerintah.

Menurut Kementerian Desa, Pembangunan Daerah dan Transmigrasi dalam strategi nasional, rendahnya kinerja perekonomian menjadi isu utama penyebab ketertinggalan daerah. Kemudian kondisi tersebut memiliki kaitan dengan permasalahan lain seperti belum optimalnya pengelolaan potensi sumber daya lokal, rendahnya kualitas dan kesejahteraan masyarakat dan rendahnya aksesibilitas terhadap pusat pertumbuhan wilayah. Dengan demikian perlu adanya upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan pengelolaan potensi lokal secara efektif dan efisien, meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur. Upaya tersebut jugaperlu didukung dengan perencanaan, strategi dan tahapan implementasi yang jelas. Fokus pembangunan harus diarahkan terhadap terciptanya pemerataan, pertumbuhan dan keberlanjutan. Kemudian lebih diorientasikan terhadap pembangunan spasial pada tingkat wilayah dengan mengutamakan sektor yang berpotensi serta pengembangan kapasitas masyarakat setempat.

Potensi Daerah

Potensi suatu wilayah dapat dilihat dari sektor unggulan yang ada, salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah analisis tabel input output. Pada analisis ini akan melihat keterkaitan antar sektor dan sektor yang berpotensi menjadi sektor unggulan yang dapat berkembang dan mendorong sektor lain dalam upaya pengembangan wilayah. Pengembangan sektor unggulan erat kaitanya dengan pengembangan wilayah.

Pemanfaatan dan pengembangan sektor unggulan yang baik dapat memacu stabilitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Tabel 5 yang merupakan struktur tabel input output Kabupaten Sukabumi tahun 2013, besaran persentase surplus usaha melebihi dari upah dan gaji. Hal ini menandakan dampak langsung yang dirasakan oleh masyarakat lebih sedikit dibandingkan para pengusaha atau investor sehingga belum dapat berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Namun akan baik bila surplus usaha di investasikan kembali ke daerah dan hal ini akan terjadi jika para pengusaha dan investor merupakan penduduk lokal daerah. Pengembangan wilayah diutamakan berbasis sumberdaya lokal dengan pengelolaan yang baik oleh sumber daya manusia dari penduduk lokal sehingga dapat berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Besarnya jumlah output antara atau permintaan antara dibandingkan permintaan akhir menandakan besarnya pengaruh keterkaitan ekonomi di dalam wilayah dalam melakukan proses produksi. Hal ini menandakan bahwa output yang ada lebih banyak digunakan untuk transaksi antar sektor dibandingkan dengan konsumsi langsung baik konsumsi rumah tangga atau belanja pemerintah. Besarnya struktur output dalam transaksi input output mengindikasikan besarnya tingkat transaksi dalam daerah, tingkat permintaan maupun ekspor.

Tabel 5 Struktur Tabel Input-Output Kabupaten Sukabumi Tahun 2013

No	Urutan	Jumlah (juta rupiah)	%
	Struktur Input	66 009 943.58	
1	Jumlah Input Antara	56 185 907.9	
2	Jumlah Impor	0	
3	Jumlah Input Primer/Nilai Tambah Bruto	9 824 035.68	100.00
	a. Upah dan Gaji	2 989 915.81	30.43
	b. Surplus Usaha	5 730 484.72	58.33
	c. Penyusutan	805 901.35	8.20
	d. Pajak Tak Langsung	297 733.80	3.03
	Struktur Output	66 009 943.58	100.00
1	Jumlah Output Antara	56 185 907.9	85.12
2	Jumlah Output Akhir	9 824 035.68	14.88

Sumber : Hasil RAS tabel input output Provinsi Jawa Barat (2010), 2015

Berdasarkan Tabel 6, sektor yang berpengaruh besar terhadap total output adalah sektor industri pengolahan non migas sebesar 80.89% kemudian sektor tanaman bahan makanan sebesar 3.15% diikuti oleh sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 3.05%. Bila dilihat dari kontribusi pembentukan total output maka ketiga sektor tersebut menjadi sektor unggulan dan potensi untuk dikembangkan. Berdasarkan PDRB Kabupaten Sukabumi tahun 2013 pula, sektor terbesar dalam kontribusi PDRB adalah tanaman bahan makanan sebesar 18.75% kemudian industri pengolahan non migas sebesar 18.36% selanjutnya perdagangan besar dan eceran sebesar 16.08% (BPS Kabupaten Sukabumi, 2014).

Keterkaitan antar sektor dapat berkaitan dengan kontribusi suatu sektor dalam perekonomian suatu wilayah dimana bagaimana suatu sektor dapat berpengaruh terhadap sektor lain dan memberikan efek baik langsung maupun tidak langsung dalam meningkatkan perekonomian secara keseluruhan. keterkaitan ini dapat menjadi

pertimbangan dalam kebijakan pengembangan wilayah dimana adanya pengembangan sektor unggulan.

Sektor industri pengolahan non migas ini dapat menjadi sektor yang di andalkan dalam membangun perekonomian di Kabupaten Sukabumi. Keterkaitan sektor industri pengolahan non migas dengan sektor lainya dapat dijadikan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan untuk mengembangkan sektor unggulan. Pengaruh sektor ini dapat memberikan kontribusi dan pengaruh terhadap sektor lain agar memberikan efek baik langsung maupun tidak langsung terhadap perekonomian daerah. Sektor lain yang mempunyai nilai yang baik dalam parameter keterkaitan antar sektor adalah sektor listrik dan konstruksi. Sektor listrik mempunyai kaitan langsung ke belakang yang baik terhadap sektor lainya dan berpengaruh juga terhadap keterkaitan ke belakang baik langsung maupun tidak langsung. Sedangkan sektor konstruksi memiliki pengaruh keterkaitan ke depan dengan sektor lainya dan keterkaitan ke belakang baik langsung maupun tidak langsung. Sektor-sektor diatas dapat menjadi sektor unggulan untuk dapat dikembangkan. Pengembangan sektor unggulan ini dapat menjadi salah satu upaya dalam kesenjangan pembangunan antar kecamatan di Kabupaten Sukabumi.

Tabel 6 Tabel Output Berdasarkan Tabel Input-Output Kabupaten Sukabumi Tahun 2013

No	Sektor	Total Output	
		Jumlah (juta rupiah)	%
1	Industri Pengolahan Non Migas	53 398 672.50	80.89
2	Tanaman Bahan Makanan	2 081 321.81	3.15
3	Perdagangan Besar dan Eceran	2 013 581.69	3.05
4	Jasa Swasta	1 261 338.49	1.91
5	Pengangkutan	1 077 361.40	1.63
6	Perhotelan dan restoran	827 471.36	1.25
7	Peternakan dan Hasil-hasilnya	820 147.76	1.24
8	Konstruksi	786 863.14	1.19
9	Jasa Pemerintahan Umum	692 395.72	1.05
10	Pertambangan bukan migas dan penggalian	676 174.20	1.02
11	Tanaman Perkebunan	619 280.26	0.94
12	Real estate dan Jasa Perusahaan	562 024.38	0.85
13	Listrik	353 577.01	0.54
14	Perikanan	243 755.67	0.37
15	Minyak dan Gas Bumi	226 744.69	0.34
16	Kehutanan	152 179.26	0.23
17	Komunikasi	107 247.90	0.16
18	Bank dan Lembaga Keuangan lainnya	101 005.20	0.15
19	Air bersih	8 801.17	0.01
20	Gas Kota	0.00	0.00
	Jumlah	66 009 943.58	100.00

Sumber : Hasil RAS tabel input output Provinsi Jawa Barat (2010), 2015

Sektor industri pengolahan non migas juga menjadi sektor tertinggi pada parameter kaitan ke depan langsung/tidak langsung (FL_i) sebesar 64.78 dan parameter kaitan ke belakang langsung/tidak langsung (BL_j) sebesar 12.32. indeks daya penyebaran (β_j)

tertinggi dan indeks daya kepekaan (α_i) tertinggi pula ada pada sektor industri pengolahan non migas secara berurutan sebesar 2.6 dan 13.7. Efek pengganda atau *multiplier effect* menandakan dampak dari suatu sektor baik langsung maupun tidak langsung terhadap perubahan peubah eksternal. Pada pengganda output, sektor tertinggi adalah sektor air bersih sebesar 15281.97, sektor komunikasi sebesar 1778.64 kemudian sektor bank dan lembaga keuangan lainnya sebesar 1711.63. Parameter pengganda pendapatan tertinggi ada pada sektor industri pengolahan non migas sebesar 29.56, sektor listrik sebesar 5.88, sektor real estate dan jasa perusahaan sebesar 4.02.

Berdasarkan hasil analisis input dan output Kabupaten Sukabumi, sektor unggulan Kabupaten Sukabumi adalah industri pengolahan non migas. Hal ini dikarenakan sektor tersebut menjadi sektor unggulan pada beberapa indikator diantaranya kaitan langsung ke depan dan belakang, kaitan ke belakang langsung dan tidak langsung, kaitan ke depan langsung dan tidak langsung dan pengganda pendapatan. Industri pengolahan non migas ini dapat meliputi industri besar, sedang atau kecil dan menengah yang bergerak di bidang selain minyak bumi dan gas.

Tabel 8 Keterkaitan Antar Sektor dan Efek Pengganda Sektor Ekonomi Kabupaten Sukabumi

Sektor	Keterkaitan Antar Sektor								Multiplier Effect		
	Bj	Bj*	Fi	Fi*	BLj	β_j	FLi	α_i	OM	IM	VM
Tanaman											
Bahan Makanan	0,12	0,27	0,02	0,05	1,48	0,31	1,69	0,36	8,83	1,20	1,13
Tanaman Perkebunan	0,17	0,40	0,11	0,27	1,90	0,40	1,21	0,26	52,91	1,16	1,20
Peternakan dan Hasil-hasilnya	0,33	0,79	0,01	0,03	3,07	0,65	1,19	0,25	100,37	1,31	1,50
Kehutanan	0,57	1,34	0,03	0,08	3,14	0,66	1,05	0,22	462,16	2,65	2,30
Perikanan	0,34	0,80	0,20	0,49	2,61	0,55	1,27	0,27	241,23	1,64	1,51
Minyak dan Gas Bumi	0,36	0,85	0,13	0,32	3,06	0,65	1,29	0,27	344,17	3,07	1,56
Pertambangan bukan migas dan penggalian	0,58	1,37	0,30	0,71	5,87	1,24	1,42	0,30	318,72	2,46	2,36
Industri Pengolahan Non Migas	0,97	2,30	3,94	9,36	12,32	2,60	64,78	13,70	11,41	29,56	29,60
Listrik	0,68	1,62	0,55	1,32	7,77	1,64	1,77	0,37	907,89	5,88	3,15
Gas Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,21	1,00	0,21	0,00	0,00	0,00
air bersih	0,26	0,61	0,01	0,03	3,80	0,80	1,02	0,22	15281,97	1,21	1,35
Konstruksi	0,66	1,56	0,60	1,42	8,85	1,87	2,10	0,45	491,19	2,47	2,90
Perdagangan Besar dan Eceran	0,22	0,51	0,46	1,09	2,67	0,56	3,50	0,74	37,21	1,29	1,27
Perhotelan dan restoran	0,35	0,83	0,37	0,88	4,82	1,02	1,73	0,37	224,87	1,44	1,54
Pengangkutan	0,51	1,22	0,28	0,65	5,81	1,23	1,91	0,40	208,07	2,21	2,06
Komunikasi	0,55	1,30	0,21	0,50	5,33	1,13	1,26	0,27	1778,64	2,64	2,21
Bank dan Lembaga Keuangan lainnya	0,38	0,91	0,09	0,20	4,71	1,00	1,21	0,25	1711,63	1,64	1,62
Real estate	0,55	1,30	0,24	0,57	5,32	1,12	1,49	0,31	334,85	4,02	2,21

dan Jasa Perusahaan Jasa Pemerintah n Umum	0,28	0,66	0,09	0,21	3,71	0,78	1,13	0,24	183,23	1,14	1,39
Jasa Swasta	0,56	1,33	0,77	1,83	7,37	1,56	2,55	0,54	248,01	1,79	2,26

Sumber : Hasil RAS tabel input output Provinsi Jawa Barat (2010), 2015

Keterangan:

B_j = kaitan langsung ke belakang/direct backward linkages

B_j^* = rasio antara B_j dengan rata-rata kaitan langsung ke belakang sektor-sektor lainnya

F_i = kaitan langsung ke depan/indirect forward linkages

F_i^* = rasio antara F_i dengan dengan rata-rata kaitan langsung ke depan sektor-sektor lainnya

BL_j = kaitan ke belakang langsung dan tidak langsung/direct-indirect backward linkages

β_j = indeks daya penyebaran/backward power of dispersion

FL_i = kaitan ke depan langsung dan tidak langsung/direct-indirect forward linkages

α_i = indeks derajat kepekaan/forward power of dispersion

OM = output multiplier atau pengganda output

IM = income multiplier atau pengganda pendapatan

VM = total value addedmultiplier atau pengganda PDRB

Kesenjangan Pembangunan

Indikator dalam melihat kesenjangan pembangunan wilayah dapat di lihat dari perkembangan wilayah itu sendiri seperti ketersediaan fasilitas atau infrastruktur yang menjadi modal dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Akses antar wilayah melalui infrasturktur atau fasilitas umum menjadi penting dalam memacu pertumbuhan pembangunan wilayah . Analisis skalogram merupakan alat analisis yang mempunyai tujuan untuk melihat capaian pembangunan wilayah dengan mengetahui pusat perkembangan wilayah melalui ketersediaan fasilitas atau infrastuktur yang dimiliki.

Berdasarkan data podes tahun 2011, analisis tingkat perkembangan wilayah didapatkan dari indeks perkembangan daerah (IPD) dan jumlah ketersediaan fasilitas. Semakin tinggi nilai indeks dan banyaknya ketersediaan fasilitas maka semakin maju atau berkembang pula wilayah tersebut yang dalam hal ini kecamatan yang ada di Kabupaten Sukabumi. Kecamatan yang memiliki indeks yang tinggi menjadi pusat pelayanan bagi wilayah sekitarnya. Menurut Tarigan (2004) ada beberapa fungsi pusat wilayah diantaranya tempat konsentrasi penduduk sebagai pasar komoditi pertanian maupun industri, pusat pelayanan terhadap daerah *hinterland*. Sedangkan *hinterland* memiliki fungsi sebagai pemasok atau produsen bahan baku, penyedia tenaga kerja melalui urbanisasi, sebagai daerah pemasaran barang dan jasa, sebagai penjaga fungsi keseimbangan ekologis. Pusat wilayah dan *hinterland* akan saling mempengaruhi dan menjaga keseimbangan sumber daya dalam upaya pembangunan wilayah.

Tabel 10 Nilai IPD dan Jumlah Ketersediaan Fasilitas Hasil Analisis Skalogram 2011

Kecamatan	Jumlah		Jumlah Ketersediaan Fasilitas	Hira rki
	Penduduk	PD		
Surade	72822	28,41	21	HIRARKI I
Pelabuhan Ratu	101399	32,02	22	HIRARKI I
Kadudampit	52040	32,52	18	HIRARKI I
Cisaat	111466	34,08	23	HIRARKI I
Cicantayan	50651	30,21	21	HIRARKI I
Parakan Salak	36908	27,40	18	HIRARKI I

Kecamatan	Jumlah		Jumlah Ketersediaan Fasilitas	Hirarki
	Penduduk	PD		
Parung Kuda	66139	29,57	20	HIRARKI I
Cibitung	25805	22,32	17	HIRARKI II
Jampang Kulon	42096	25,51	21	HIRARKI II
Simpenan	50849	26,22	18	HIRARKI II
Sukaraja	80403	21,79	19	HIRARKI II
Cireunghas	32976	24,27	18	HIRARKI II
Sukabumi	48590	25,22	20	HIRARKI II
Gunungguruh	48815	22,80	20	HIRARKI II
Cibadak	104680	20,91	21	HIRARKI II
Nagrak	78215	23,08	21	HIRARKI II
Cicurug	156884	26,35	21	HIRARKI II
Cidahu	60656	20,89	20	HIRARKI II
Bojong Genteng	35260	25,25	16	HIRARKI II
Cisolok	65041	21,98	21	HIRARKI II
Cikakak	38430	23,88	20	HIRARKI II
Ciemas	51932	16,60	19	HIRARKI III
Ciracap	49576	16,93	17	HIRARKI III
Waluran	26326	16,24	17	HIRARKI III
Cimanggu	22905	16,95	17	HIRARKI III
Kali Bunder	29201	19,72	15	HIRARKI III
Tegal Buleud	35274	19,97	19	HIRARKI III
Cidolog	18291	19,12	15	HIRARKI III
Sagaranten	50840	20,20	19	HIRARKI III
Cidadap	19378	16,16	13	HIRARKI III
Curugkembar	29994	19,26	16	HIRARKI III
Pabuaran	42623	11,96	14	HIRARKI III
Lengkong	31879	15,41	17	HIRARKI III
Warung Kiara	58901	16,44	21	HIRARKI III
Bantargadung	38369	12,90	16	HIRARKI III
Jampang Tengah	66505	19,83	18	HIRARKI III
Purabaya	43204	14,01	18	HIRARKI III
Cikembar	80985	15,77	20	HIRARKI III
Nyalindung	46418	19,99	20	HIRARKI III
Geger Bitung	39116	15,91	19	HIRARKI III
Kebonpedes	28463	15,02	16	HIRARKI III
Sukalarang	41359	16,52	18	HIRARKI III
Caringin	44171	16,62	14	HIRARKI III
Ciambar	37664	12,24	15	HIRARKI III
Kalapa Nunggal	46665	19,29	20	HIRARKI III
Cikidang	61598	16,93	19	HIRARKI III
Kabandungan	41048	9,79	13	HIRARKI III

Berdasarkan perkembangan daerah sebagian kecamatan di Kabupaten Sukabumi masih termasuk dalam hirarki III lebih tepatnya ada 26 kecamatan. Ini menunjukkan perkembangan daerah di Kabupaten Sukabumi belum merata masih didominasi dengan kecamatan yang tingkat perkembangan daerahnya rendah. Sebanyak 27 kecamatan pada hirarki III, 23 kecamatan berada di Kabupaten Sukabumi bagian selatan dan 4 kecamatan berada di bagian utara Kabupaten Sukabumi. Pada hirarki I terdapat 7 kecamatan dimana 5 kecamatan berada di bagian utara Kabupaten Sukabumi diantaranya Kadudampit, Parung Kuda, Cicantayan, Cisaat, Parakan salak. Kemudian hanya 2 kecamatan berada di bagian

selatan diantaranya Surade dan Pelabuhan Ratu. Seluruh kecamatan tersebut diharapkan menjadi pusat pertumbuhan pada wilayah bagian sekitarnya. Jika dilihat dari persebarannya perlu adanya kecamatan baru yang dijadikan pusat wilayah di bagian selatan karena hanya dua kecamatan yang termasuk dalam hirarki I dari 26 kecamatan di bagian selatan. Kecamatan yang baru tersebut dapat dilihat dari kecamatan yang termasuk dalam hirarki II. Berdasarkan indeks perkembangan wilayahnya, kecamatan pada hirarki II yang berpotensi untuk dijadikan pusat pertumbuhan baru adalah Simpenan, Jampang Kulon, Sukabumi karena memiliki indeks perkembangan daerah yang cukup baik. Kemudian Pelabuhan Ratu yang berada dalam hirarki I dalam beberapa tahun terakhir sudah dijadikan ibu kota baru dari Kabupaten Sukabumi. Salah satu tujuannya untuk membuat pengembangan daerah disekitarnya agar lebih maju dan merata.

Perlu menjadi perhatian berdasarkan hasil analisis di atas bahwa tingkat perkembangan daerah yang tidak merata pada seluruh kecamatan di Kabupaten Sukabumi. Adanya kesenjangan pembangunan antara kecamatan yang berada di bagian utara dan bagian selatan di Kabupaten Sukabumi. Kesenjangan yang ada di Kabupaten Sukabumi disebabkan rendahnya aksesibilitas pelayanan sarana prasarana ekonomi dan sosial. Tidak meratanya ketersediaan sarana dan prasarana di seluruh kecamatan sehingga perkembangan daerah tidak dapat tumbuh secara maksimal. Hal ini pula berakibat pada pengembangan kualitas sumberdaya manusia di kecamatan yang tingkat perkembangan daerahnya rendah sehingga akan timbul permasalahan kemiskinan, pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian permasalahan tersebut dapat menyebabkan ketertinggalan daerah Kabupaten Sukabumi dengan daerah lainnya.

KESIMPULAN

Perkembangan wilayah Kabupaten Sukabumi berdasarkan beberapa kriteria dari Kementerian Desa, Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi menunjukkan bahwa perkembangan dalam berbagai bidang masih perlu ditingkatkan. Perlu adanya upaya perbaikan pada bidang ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi dan indeks kedalaman kemiskinan, bidang sumberdaya manusia seperti angka harapan hidup, kemampuan keuangan lokal seperti tingkat ketergantungan keuangan daerah masih tinggi terhadap sumber dana dari luar dan pengeluaran belanja daerah Kabupaten Sukabumi sebagian besar masih diprioritaskan untuk belanja rutin. Terdapat kesenjangan pembangunan daerah di Kabupaten Sukabumi. Hal ini terlihat dari tingkat perkembangan daerah pada tiap kecamatan yang tidak seragam dan perkembangan industri di tiap kecamatan tidak tumbuh dengan seragam. Kabupaten Sukabumi mempunyai beberapa potensi sektor diantaranya sektor industri.. Pada sektor industri khususnya, industri pengolahan non migas dapat menjadi sektor unggulan karena dapat berkontribusi dan memiliki keterkaitan yang kuat dengan sektor lainnya sehingga dapat mempengaruhi sektor lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2008. Potensi Desa. Jakarta
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2011. Potensi Desa. Jakarta
- [BPS] Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukabumi. 2012. Sukabumi Dalam Angka. Kabupaten Sukabumi.
- [BPS] Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukabumi. 2013. Sukabumi Dalam Angka. Kabupaten Sukabumi.
- [BPS] Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukabumi. 2014. Sukabumi Dalam Angka. Kabupaten Sukabumi.
- [Bappeda] Badan Perencanaan Daerah. 2013. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Propinsi Jawa Barat

- Harafera, M. 2011. Kebijakan Pembangunan dan Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah. Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi Sekretarian Jenderal DPR RI. Jakarta.
- Juanti. F., Jumiaty. A., Santoso. E. 2014. *Economic Landscape* Sub Sektor Perikanan Pada Perekonomian Kabupaten Sidoarjo: Model Input Output Dan *Analytical Hierarchy Proces*. Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akutansi. Volume 1 (1). Hlm 42-52.
- Kementerian Desa, Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi. 2012. Strategi Nasional Pembangunan Daerah Tertinggal. Departemen Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia. Jakarta.
- Masykur, R. D. 2000. Pembangunan Daerah Melalui Pengembangan Wilayah. Materi disampaikan pada Acara Diseminasi dan Diskusi Program-Program Pengembangan Wilayah dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat di Daerah pada tanggal 15-16 Mei 2000, Bogor.
- Rustiadi, E., Saifulhakim, S. dan Panuju, D.R. 2009. Perencanaan dan Pembangunan Wilayah. Crestpe press. Jakarta.
- Tarigan. R. 2004. Perencanaan Pembangunan Wilayah. Jakarta. Bumi Aksara.